

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI INDONESIA**

DISERTASI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Oleh

**SUCI RAMADANI
NIM 1730112006**

Promotor :

- 1. Prof.Dr.Elwi Danil, SH.,MH**
- 2. Dr. Fadillah Sabri, SH.,MH**
- 3. Prof.Dr. Aria Zurnetti, SH.,M.Hum**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Suci Ramadami, NIM 1730112006, 401 Halaman, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2023

ABSTRAK

Peredaran gelap narkotika menempati peringkat pertama dalam kejahatan transnasional, peredaran narkotika tidak memandang perbatasan, tidak mengenal yuridiksi wilayah dan kebangsaan narkotika selalu menjadi suatu masalah internasional yang berkepanjangan. Peningkatan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional perdagangan gelap narkotika menjanjikan keuntungan yang sangat besar bagi organisasi-organisasi kejahatan dan terus berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan kegiatan ilegal tersebut dengan cara menyusuk mencampuri dan merusak struktur pemerintah serta mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu yang ada di dalam masyarakat. Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Bagaimanakah Implementasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Bagaimanakah Seharusnya Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. Metode Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif dan empiris. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis selain menggambarkan atau memaparkan atas subjek atau objek penelitian juga dilakukan analisis mendalam terhadap kondisi peredaran narkotika di berbagai wilayah. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder data primer. Selain bahan hukum primer sekunder dan tersier sumber data yang diperoleh dari observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang empiris teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Di tengah kondisi darurat narkoba dan cita-cita pencapaian reaksi *Drug Free ASEAN 2025* pada tingkat regional bersama anggota negara ASEAN Indonesia ditantang untuk menemukan metode penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang efektif yang efektif dan efisien Indonesia telah mempunyai modal yang luar biasa baik dari segi *good will* dan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung serta lembaga formal dalam bentuk badan atau kementerian sebagai pelaksanaan kebijakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 juga membuka peluang sangat besar bagi partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Berbagai manfaat tersebut antara lain mengurangi tuntutan pidana hukum murni dan kecenderungan over kapasitas dalam penjara kasus narkoba memutus rantai perdagangan narkoba memberikan pemulihan bagi pecandu dan mengatasi kerugian ekonomi dan sosial serta mendorong kemandirian masyarakat untuk memulihkan diri sendiri namun dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial membutuhkan operasional sistem dan yang mensyaratkan kepemimpinan manajemen koordinasi antar instansi menyiapkan sumber daya manusia serta integrasi sistem dari hulu ke hilir kematangan sosial masyarakat terkait narkoba juga perlu mendapatkan perhatian agar kebijakan yang dilakukan tanpa sasaran fokus prioritas pada upaya pemberantasan oleh berbagai pihak aparat dan masyarakat dianggap lebih sesuai dalam kondisi darurat narkoba Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Penanggulangan Tindak Pidana, Narkotika.

CRIMINAL LAW POLICY IN OVERCOMING NARCOTICS CRIMES IN INDONESIA

Suci Ramadami, NIM 1730112006, 401 Pages, Doctor of Law Program,
Faculty of Law, University of Andalas Padang, Year 2023

ABSTRACT

Narcotics trafficking ranks first in transnational crimes, narcotics trafficking syndicates do not look at borders, do not recognize regional jurisdiction and narcotics nationality has always been a prolonged international problem. The increase in illicit drug trafficking is inseparable from the activities of transnational crime organizations operating in various countries in an international crime network. Illicit drug trafficking promises enormous profits for criminal organizations and continues to try by all means to maintain and develop these illegal activities by interfering and damaging government structures and influencing certain groups in society. How is the Criminal Law Policy in Combating Narcotics Crime in Indonesia, How is the Implementation of Criminal Law in Combating Narcotics Crime in Indonesia, How should the Criminal Law Policy in Combating Narcotics Crime in Indonesia. This research method is a normative and empirical legal research. The nature of the research is descriptive analytical in addition to describing or explaining the subject or object of research, an in-depth analysis of the conditions of narcotics trafficking in various regions is also carried out. The data sources used are secondary data primary data. In addition to secondary and tertiary primary legal materials, data sources obtained from observations and interviews to obtain empirical data, data collection techniques are carried out by literature study and document study while data analysis is carried out qualitatively. In the midst of drug emergency conditions and the ideals of achieving Drug Free ASEAN 2025 reactions at the regional level with ASEAN member countries Indonesia is challenged to find effective methods of overcoming drug abuse that are effective and efficient Indonesia already has tremendous capital both in terms of good will and supporting legislation and formal institutions in the form of agencies or ministries as policy implementation of law number 35 of 2009 also opens up enormous opportunities for community participation and involvement in drug prevention and abuse efforts. The various benefits include reducing pure legal criminal charges and the tendency to overcapacitate in prison drug cases breaking the chain of drug trafficking providing recovery for addicts and overcoming economic and social losses and encouraging community independence to restore themselves but in the implementation of medical and social rehabilitation requires an operational system and which requires leadership management coordination between agencies preparing human resources and system integration from upstream to downstream social maturity of drug-related communities also needs attention so that policies carried out without the target of priority focus on eradication efforts by various parties apparatus and society are considered more appropriate in the conditions of Indonesia's drugs emergency

Keywords: Criminal Law Policy, Crime Control, Narcotics